

PAN Coret Caleg Mantan Koruptor,

Gerindra Tetap Usung M Taufik

17/09/2018, 08:47 WIB | Editor: Ilham Safutra



Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan pihak komit untuk mengusung caleg yang bersih.

(Hendra Eka/Jawa Pos)

JawaPos.com- Putusan Mahkamah Agung (MA) yang membolehkan mantan napi kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (caleg) tidak serta merta diikuti oleh partai [politik](#). Beberapa parpol mulai menarik nama calegnya di daftar calon sementara (DCS).

Langkah itu dilakan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra. Hanya saja Partai Gerindra memberikan perlakuan khusus kepada M Taufik. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta tetap diusung sebagai caleg.

"Meski sudah ada kepastian [hukum](#), PAN tetap konsisten tidak mencalonkan (mantan) napi tipikor (tindak pidana korupsi, Red)," kata Sekretaris Jenderal DPP PAN Eddy Soeparno di Jakarta kemarin.

36 EKS KORUPTOR BACALEG YANG DILOLOSKAN BAWASLU



DPD-RI

Aceh
Abdullah Puteh

Sulut
Syahrial Kui Domapolii

DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA



Belitung Timur
Masri

Lingga
Muhammad Afrizal

Jambi
Abdullah Fattah

Cilegon
Bahri Syamsu Arief



Bulukumba
Andi Muttamar M

Ende
Yohanes Mariunus

Sulawesi Utara
Mieke Nangka

Maluku Utara
Arif Armain



Rembang
Nur Hasan

Jawa Tengah
Mudatsir

Blora
M. Warsit

Maluku Utara
Akhmad Ibrahim



Pandeglang
Heri Baelamu
Dede Widarso

Kabupaten Blitar
Edy Muklison

Tojo Una-Una
Saiful Talib Lami

Maluku Utara
Hamid Usman



Rejang Lebong
Edi Iskandar
Abu Bakar



Nias Selatan
Julius Dakhi
Ariston Moko



Cilegon
Jhony Hasibuan

Manado
Darmawati Dareho



Kota Pare-Pare
Ramadhan U

Gorontalo
Samuel Bintang



Infografis bacaleg eks koruptor (Rofiah Darajat/JawaPos.com)

Eddy mencatat, di PAN ada satu bacaleg DPRD provinsi dan tiga bacaleg DPRD kabupaten/kota yang merupakan mantan koruptor. Mereka masih ingin maju sebagai caleg. Eddy menambahkan, penarikan caleg mantan koruptor akan diputuskan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). "Kami sudah berkomunikasi untuk dilakukan evaluasi terhadap pencalegan mereka," terang dia.

Langkah yang sama akan dilakukan oleh Partai Gerindra. Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan instruksi kepada DPD dan DPC. "Kami sudah minta untuk ditarik," kata dia sesuai rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) di kantor KPU kemarin (16/9).

Namun, ada perlakuan khusus bagi [M. Taufik](#). Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu tidak diganti. Sebab, Taufik menjadi pemohon judicial review di MA. Riza mengatakan, pihaknya menghormati upaya hukum yang ditempuh Taufik. "Setiap warga negara mempunyai hak membela diri," tutur dia.

Yang pasti, menurut wakil ketua Komisi II DPR itu, pihaknya mempunyai komitmen yang kuat dalam mendukung [pemberantasan korupsi](#). Jauh-jauh hari DPP Partai Gerindra juga sudah mengimbau seluruh DPD dan DPC agar tidak mencalonkan eks napi kasus korupsi. "Di DPR kan tidak ada yang mantan koruptor," tutur dia.

(lum/bay/syn/tyo/c9/c11/tom)